

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bercermin pada situasi dan kondisi yang sedang terjadi di negeri ini yaitu masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan *urbanisasi/migrasi* masyarakat perdesaan ke perkotaan dan/atau keluar negeri hanya sekedar untuk menjadi buruh kasar dengan predikat sebagai pejuang devisa. Fenomena ini seharusnya menjadi kekhawatiran seluruh anak bangsa, terlebih lagi tingginya angka tenaga kerja *informal* di perkotaan dan/atau ke luar negeri tanpa perlindungan hukum yang memadai, sehingga kita tidak mampu berbuat banyak walaupun hanya untuk membantu mereka yang terkena masalah hukum terutama mereka yang bekerja di luar negeri, sebagaimana banyak dialami para tenaga kerja Indonesia di negara-negara Timur Tengah atau Malaysia dan negara-negara Asia lainnya yang memiliki perbedaan system hukum.

Berkenaan dengan hal itu Badan Pusat Statistik melaporkan, perbulan september 2014 jumlah angka kemiskinan di Indonesia mencapai 27.727.780 jiwa (10,96 %) dan angka pengangguran mencapai 7,39 % dari jumlah angkatan kerja sebanyak 118.190 juta orang. Sementara itu BNP2TKI melaporkan, perbulan september 2013 mereka yang *eksodus* keluar negeri untuk menjadi tenaga kerja sebanyak 512.168 orang, 226.871 orang (44 %) bekerja pada sektor *informal* yang tanpa membutuhkan keterampilan khusus, seperti tenaga penyelia rumah tangga. 285.197 orang (56 %) bekerja pada sektor *formal* dengan mengandalkan berbagai keterampilan yang dimilikinya. Dengan makin diminatinya bekerja pada sektor *informal* dan membanjirnya *urbanisasi*, berdampak pada makin terlantarnya sumber daya perdesaan, terutama lahan dan pertanian.

Sementara itu, dipihak lain lembaga-lembaga pendidikan *formal* cenderung menghasilkan calon-calon tenaga kerja potensial yang hanya siap latih dan tidak siap

kerja, konon sebagian besar dari mereka adalah lulusan dari Sekolah Menengah Kejuruan dan Diploma yang pada akhirnya menjadi pengangguran terdidik. Dalam

Abdul Karim Halim, 2015

***PENGEMBANGAN MODEL KURSUS WIRSAUSAHA PERDESAAN BERBASIS KEBUTUHAN PESERTA DIDIK
UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN WIRSAUSAHAWAN BARU DI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
KABUPATEN BOGOR***

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

fenomena seperti ini, kehadiran lembaga kursus dan pelatihan seperti Kursus Wirausaha Perdesaan seharusnya mampu memberikan solusi. Namun demikian ternyata tidak dapat diandalkan sepenuhnya. Apa sebenarnya yang menjadi faktor penyebab ? Bagaimana menanggulangnya ? Itulah yang ingin dicari, dengan mencoba membangun teori yang dapat memberikan solusi untuk menumbuhkan kembali berbagai kekuatan lokal yang dapat membangkitkan minat masyarakat dalam membangun desa, melalui pengembangan model Kursus Wirausaha Perdesaan berbasis kebutuhan peserta didik Untuk meningkatkan kemampuan wirausahawan baru. Program sejenis selama ini diprakarsai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sanggar Kegiatan Belajar di setiap Kabupaten seluruh Indonesia.

Program ini dilatar belakangi oleh kondisi obyektif masyarakat di perdesaan sebagaimana dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik bahwa pada awal tahun 2011 (Kemendiknas, 2010:5) tingkat pengangguran terbuka berdasarkan pendidikan terakhir, adalah sebagai berikut :

Jumlah pengangguran terbuka pada bulan Februari 2011 mencapai 8,1 juta orang atau 6,80 % dari total angkatan kerja sebesar 119,4 juta orang. Bila dilihat dari latar belakang pendidikannya para penganggur terbuka tersebut terdiri dari 3,81 % berpendidikan Sekolah Dasar ke bawah. 7,45 % berpendidikan Sekolah Menengah Pertama, 11,90 % berpendidikan Sekolah Menengah Atas. 11,87 % berpendidikan Sekolah Menengah Kejuruan. 12,78 % berpendidikan Diploma I/II/III dan 11,92 % berpendidikan Universitas. Kalau pun terjadi penurunan angka pengangguran terbuka sebesar 4,29 % dibandingkan dengan bulan Agustus 2010, bukan akibat naiknya angka orang yang berwirausaha tetapi karena adanya penerimaan Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Tinggi.

Pernyataan bahwa, ‘penurunan angka pengangguran terbuka sebesar 4,29 %’ bukan akibat naiknya angka orang yang berusaha karena semangat kewirausahaannya, tetapi karena adanya penerimaan pegawai negeri sipil pada jenjang pendidikan tinggi’. Ini menunjukkan bahwa para sarjana kita belum memiliki kemampuan untuk mandiri dalam berwirausaha, buktinya setelah lulus mereka memilih untuk menjadi bagian dari masyarakat yang menjadi beban negara dari pada berkontribusi untuk meringankan beban negara, padahal harapan bangsa ini agar para

lulusan perguruan tinggi mampu hidup lebih mandiri dan bergerak dalam bidang kewirausahaan dengan memanfaatkan berbagai sektor yang menjadi kekayaan negeri ini, sehingga mampu membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Syarief Hasan (Merlinda Riska, Nasional.Kontan.co.id; Indonesia Seharusnya Punya 9 Juta Wirausahawan. Diposting; Jum'at, 8 Juni 2012 Pkl 14.57) mengatakan;

Setiap negara idealnya memiliki wirausahawan minimal sebanyak 2 % dari total jumlah penduduknya, sementara negara kita, Indonesia baru mencapai 0,8 % (\pm 400.000 orang) dari total 230 juta penduduk, sedangkan negara-negara industri seperti Jepang, Singapura, USA, Korea, bahkan saat ini Malaysia dan China sudah memiliki 5 sampai dengan 15 % wirausahawan dari jumlah populasi penduduknya.

Faktor apa sebenarnya yang menjadi penyebab ketidak berhasilan dunia pendidikan kita mewujudkan kemampuan dan kemandirian para lulusannya dalam berwirausaha sehingga dapat melahirkan lebih banyak lagi wirausahawan baru ? Jawaban atas pertanyaan tersebut dikatakan oleh Muhammad Yamin (2009:94) sebagai berikut :

Ada kesalahan dari bangsa kita dalam menghargai hasil pendidikan, sebagian besar masyarakat kita hanya memberikan penghargaan pada prestasi seseorang bila memberikan nilai material, bernilai ekonomi produktif, dan dapat dimanfaatkan bagi kehidupan praktis secara teknis. Oleh karena itu sangat wajar apabila produk-produk pendidikan diarahkan untuk menjadi pekerja, sehingga setelah tamat dari bangku pendidikan mereka berlomba untuk masuk ke dunia kerja dan siap menjadi kuli untuk diperintah atasan. Maka pendidikan bukan lagi melahirkan para terdidik yang siap mengabdikan kepada bangsa dan negara guna melakukan perubahan, tetapi mereka berada dibawah kendali para penguasa, pengusaha dan elemen bangsa lainnya yang memiliki modal besar.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Depdiknas, 2003 :12) telah ditetapkan, bahwa :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Mencermati isi dari pada fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut, maka selayaknya system pendidikan nasional kita mampu memenuhi berbagai tuntutan peran yang *multi dimensional*. Secara umum pendidikan nasional harus mampu menghasilkan manusia yang; 1. Memiliki kepribadian kuat, religius dan menjunjung tinggi budaya luhur bangsa; 2. Memiliki kesadaran berdemokrasi, sadar bahwa dirinya lahir dilengkapi dengan berbagai perbedaan dengan orang lain yang sebangsa dan setanah air, lebih mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat demi tercapainya cita-cita bangsa yang merdeka, berdaulat serta memiliki tanggung jawab untuk menciptakan perdamaian dunia; 3. Memiliki kesadaran moral dan hukum yang tinggi untuk mampu hidup lebih tertib dan aman antar sesama anak bangsa, serta; 4. Memiliki kehidupan yang lebih subur, makmur dan sejahtera. Suatu kehidupan yang mandiri, mampu mencari, menemukan dan melaksanakan hal-hal baru, *inovatif* dan *inventif* untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan individu, masyarakat, bangsa dan negara.

Agar mampu memenuhi tuntutan tersebut di atas, maka selayaknya sistem pendidikan kita *meratifikasi* 4 (empat) pilar pendidikan secara terpadu, sebagaimana dicanangkan oleh UNESCO (Fasli Jalal dalam Dedi Supriyadi, 2001:67; Soedijarto, 2007:22-23; dan Ace Suryadi, 2009:137) yang menyatakan: “Pendidikan hendaknya mengembangkan kemampuan belajar untuk mengetahui (*learning to know*), belajar untuk melakukan sesuatu (*learning to do*), belajar menjadi seseorang (*learning to be*) dan belajar menjalani kehidupan bersama (*learning to live together*)“. Dalam konteks sistem pendidikan di Indonesia, penerapan konsep ini mengandung arti bahwa negara berkewajiban untuk mempersiapkan seluruh warga negaranya agar berperan aktif dalam semua sektor kehidupan guna mewujudkan masyarakat yang cerdas, aktif, kreatif, dan mandiri.

Untuk mampu memenuhi harapan seperti yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional dan konsep yang digagas oleh UNESCO tersebut tidak mungkin hanya ditanggulangi oleh *Subsystem* pendidikan persekohan (pendidikan formal), akan tetapi membutuhkan juga peran aktif dari *Subsystem* pendidikan luar sekolah

yang terdiri dari pendidikan nonformal dan informal. Pendidikan luar sekolah memiliki fungsi (Djudju Sudjana, 2004: 74) yang dapat ditampilkan dalam:

Pemecahan masalah yang dihadapi pendidikan persekolahan adalah sebagai pelengkap (*complementary education*); Mengandung arti pendidikan luar sekolah dapat menyajikan berbagai mata pelajaran atau kegiatan belajar yang belum termuat dalam kurikulum pendidikan sekolah sedangkan materi pelajaran atau kegiatan belajar tersebut sangat dibutuhkan oleh anak didik dan masyarakat yang menjadi layanan sekolah tersebut. Sebagai penambah (*supplementary education*); Pendidikan luar sekolah dapat memberi kesempatan tambahan pengalaman belajar dalam mata pelajaran yang sama yang ditempuh di sekolah kepada mereka yang masih bersekolah atau mereka yang telah menamatkan jenjang pendidikan sekolah, tambahan pengalaman belajar ini dilakukan di tempat yang sama atau di tempat lain dengan waktu yang berbeda. Sebagai pengganti (*substitute education*); Pendidikan luar sekolah dapat menggantikan fungsi sekolah di daerah-daerah yang karena berbagai alasan, penduduknya belum terjangkau oleh pendidikan sekolah.

Demikian pula halnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Wisnu Setiawan, 2010:77) dikatakan;

Pendidikan nonformal bertujuan membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pernyataan tersebut di atas didukung oleh isi dari pada Rencana Aksi Dakkar yang dideklarasikan di Senegal pada bulan april 2000. Rencana aksi tersebut berisi tujuan dan tekad negara-negara peserta dan komunitas internasional untuk mencapai ‘Pendidikan dasar yang bermutu’ bagi setiap warga negara dari negara yang hadir dalam Forum Pendidikan Dunia dari tahun 2002 hingga 2015. Deklarasi tersebut (Kusnadi, 2005:27) bertujuan untuk:

1. Memperluas dan memperbaiki perawatan dan pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) secara *konprehensif*, khususnya anak yang paling rawan dan kurang beruntung;
2. Menjamin semua anak pada tahun 2015, khususnya anak perempuan dan anak dalam keadaan susah dan anak-anak kelompok minoritas, harus mendapat akses dan menyelesaikan pendidikan dasar yang bermutu dengan gratis;
3. Menjamin semua kebutuhan belajar bagi anak-anak muda dan orang dewasa terpenuhi melalui kesempatan yang sama untuk memperoleh program-program pembelajaran dan keterampilan kehidupan (*life skill*);
4. Mencapai perbaikan

tingkat keaksaraan orang dewasa sebesar 50 % pada tahun 2015 khususnya wanita dan kesamaan akses pendidikan dasar dan pendidikan berkelanjutan bagi semua orang dewasa; 5. Menghilangkan perbedaan gender dalam pendidikan yang bermutu; dan 6. Memperbaiki semua aspek mutu pendidikan dan menjamin keunggulan semua sehingga hasil belajar yang diakui dan terukur dapat dicapai oleh semua, khususnya dalam keaksaraan, keterampilan berhitung dan keterampilan hidup.

Menindaklanjuti kesepakatan tersebut di atas Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan baik dalam bentuk Undang-Undang, Instruksi Presiden, dan/atau Peraturan Pemerintah, seperti Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan Pemberantasan Buta Aksara. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan lain-lain. Sehingga setiap tahunnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) Indonesia diharapkan terus meningkat.

Pada tanggal 4 november 2011 (Taufiq Hanafi, Edukasi Kompas.com/rea/2011/11/1715426/Indeks Pembangunan Manusia Indonesia, diposting jum'at 4 november 2011 Pkl 17.17 Wib) dilaporkan Indek Pembangunan Manusia Indonesia ada pada urutan 124 (*skor* 0,617) dari 187 negara, skor yang diperoleh menunjukkan kenaikan walaupun sangat tipis yaitu dari 0,600 ke 0,617. Nampak jelas IPM bangsa kita masih sangat rendah bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga sekali pun. Bagaimana dengan IPM Kabupaten Bogor? Bappeda Kabupaten Bogor (2015) melaporkan bahwa pada tahun 2013 IPM Kabupaten Bogor baru mencapai 73,92 dan pada tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 74,25. Berdasarkan pencapaian angka IPM ini Kabupaten Bogor berada pada tingkatan status Menengah Atas ($66 \leq \text{IPM} \leq 80$). Indeks Pembangunan Manusia merupakan *agregasi* dan kombinasi dari nilai-nilai komponen pendukungnya, sehingga perkembangan IPM sangat ditentukan oleh perkembangan komponennya,

Abdul Karim Halim, 2015

PENGEMBANGAN MODEL KURSUS WIRAUUSAHA PERDESAAN BERBASIS KEBUTUHAN PESERTA DIDIK UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN WIRUSAHAWAN BARU DI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN BOGOR

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

yang meliputi Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Hurup (AMH) orang dewasa dan Pengeluaran Penduduk Perkapita (*Purchasing Power Parity – PPP*). Selama 7 (tujuh) tahun, sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bogor telah meningkat, dari 68,03 menjadi 70,35. Dibidang pendidikan, Angka Melek Huruf (AMH) orang dewasa meningkat dari 93,59% menjadi 96,98%. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat dari 7,20 menjadi 8,04. Sementara itu, bidang ekonomi yang diwakili oleh komponen Pengeluaran Perkapita Penduduk (*purchasing power parity - PPP*) mengalami peningkatan dari 627.740.000 menjadi sebesar 639.660.000.

Dalam teori ekonomi pembangunan, dikatakan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan produktivitas sumber daya manusia. Pendidikan dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas tenaga kerja, *stimulasi inovasi* dan *riset* serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kapabilitas individu dalam menetapkan pilihannya merupakan hal yang penting untuk kesejahteraan manusia. Terdapat *korelasi positif* yang tinggi antara faktor pendidikan dan kesehatan dengan *output perkapita* atau *GNP perkapita*. Pada waktu bersamaan, hubungan sebab akibatnya adalah pendapatan *perkapita* yang tinggi mendorong penduduk membelanjakan lebih banyak pendapatannya untuk pendidikan dan kesehatan.

Mengacu pada beberapa pernyataan dan upaya yang dilakukan pemerintah tersebut di atas, maka peranan pendidikan luar sekolah menjadi sangat strategis sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar memiliki daya saing dalam menghadapi *era globalisasi* dengan menguasai berbagai keterampilan *fungsional*, yaitu keterampilan hidup yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sehingga mereka mampu hidup dengan kemandiriannya.

Adapun bentuk-bentuk keterampilan dimaksud berkaitan dengan keterampilan kerumahtangaan atau keterampilan jasa seperti; penguasaan teknologi komputer dan *informatika*, perbengkelan, menjahit, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, pertukangan dan/atau industri kreatif lainnya. Setelah menguasai berbagai

Abdul Karim Halim, 2015

**PENGEMBANGAN MODEL KURSUS WIRUSAHA PERDESAAN BERBASIS KEBUTUHAN PESERTA DIDIK
UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN WIRUSAHAWAN BARU DI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
KABUPATEN BOGOR**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

keterampilan fungsional tersebut warga masyarakat diharapkan mampu mengaflikasikan keterampilan yang dimilikinya dalam kehidupannya sehari-hari untuk kepentingan dirinya dan/atau masyarakat, dengan cara *mentransfer* berbagai ilmu dan keterampilan yang dimilikinya kepada pihak lain yang membutuhkan dalam kedudukannya sebagai instruktur, pelatih, tutor, pengajar atau bahkan menjadi tenaga ahli. Apabila dicermati dengan lebih bijak maka peran pendidikan luar sekolah dalam memberikan keterampilan dan kecakapan hidup kepada masyarakat nampak sekali kegunaan dan manfaatnya, dalam upaya meningkatkan kemandirian hidup seseorang atau bahkan bangsa dan negara.

Namun demikian lebih dari setengah abad negeri ini merdeka, ternyata bangsa kita masih belum mampu mandiri dalam banyak hal yang mendasar, seperti digambarkan oleh Sudiarto (2007:18), yaitu :

1. Makin tergantungnya tenaga kerja Indonesia pada kesempatan kerja di luar negeri;
2. Terus meningkatnya *impor* hasil bumi dan peternakan (beras, gula, kedelai, terigu, bahkan garam, daging ayam dan sapi bakalan);
3. Sebagian besar potensi sumber daya alam dan ekonomi (seperti kelapa sawit, emas, tembaga, minyak dan gas bumi dan perbankan) kita secara ekonomi sudah dikuasai asing;
4. Masih banyaknya rakyat Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan;
5. Tingginya angka Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di seluruh lapisan masyarakat Indonesia;
6. Rentannya rasa persatuan dan kesatuan bangsa serta gotong royong;
7. Rendahnya budaya demokrasi politik dan musyawarah untuk mufakat;
8. Belum ada persepsi yang sama tentang makna kepentingan nasional diantara para elite politik dan para pemimpin negara; dan
9. Menurunnya kualitas budaya dan bekerja mandiri, terutama dikalangan generasi muda.

Kondisi tersebut di atas sangat berhubungan dengan hasil dari pada praktek pendidikan di Indonesia, khususnya pada sektor pendidikan *formal* yang mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dibandingkan dengan pendidikan *nonformal*. Belajar dari kurang berhasil pendidikan *formal* dalam menghasilkan masyarakat yang mandiri, pendidikan luar sekolah (*nonformal & informal education*) diharapkan mampu memperkecil kelemahan daripada pendidikan persekolahan (*formal education*), melalui berbagai program dan satuan pendidikannya, salah satu diantaranya adalah program Kursus Wirausaha Perdesaan (KWD). Program ini diharapkan mampu *mengeliminir* berbagai permasalahan yang ada di masyarakat

khususnya di perdesaan, antara lain tingginya; 1. angka pengangguran tenaga kerja potensial; 2. angka kemiskinan masyarakat perdesaan; 3. angka *migrasi* dan *urbanisasi* sumber daya manusia perdesaan; 4. keterlantaran lahan dan sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber daya sosial masyarakat perdesaan dan 5. angka ketergantungan hidup masyarakat perdesaan yang diakibatkan oleh rendahnya kemampuan dan kemandirian berwirausaha.

Harapan yang tinggi kepada program pendidikan luar sekolah untuk memecahkan permasalahan sebagaimana tersebut di atas, melalui kursus wirausaha perdesaan ternyata belum sepenuhnya dapat diandalkan. Berdasarkan data yang terekam di Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan *Nonformal/Informal* (P2 PAUDNI) Regional I Jayagiri Lembang Kabupaten Bandung Barat yang penulis analisis pada tanggal 21 juli 2011. Dari laporan yang disampaikan oleh 12 (*dua belas*) Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Se Jawa Barat penyelenggara kursus wirausaha perdesaan tahun anggaran 2010, terdapat 226 (dua ratus dua puluh enam) orang warga belajar yang mengikuti berbagai bentuk keterampilan kecakapan hidup untuk wilayah perdesaan seperti pertanian, peternakan, perikanan, pengolahan hasil pertanian dan usaha perdesaan lainnya, tidak terbaca ada lulusan kursus wirausaha perdesaan yang menjadi wirausahawan baru. Mereka hanya tercatat lebih dari setengahnya (52,21 %) orang sebagai pelaku usaha kecil/mikro, sehingga tidak mampu membantu memberdayakan orang lain sebagaimana layaknya karakter seorang wirausahawan dan yang lainnya masing-masing sebagian kecil (20,3 %) bekerja pada perusahaan mitra kerja program, 28,7% tidak jelas, apakah mereka bekerja atau tidak, dan lainnya 3,10 % tidak dapat mengikuti proses pembelajaran sampai tuntas/selesai.

Demikian pula kondisi faktual kursus wirausaha perdesaan yang dilakukan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bogor, penulis mendapatkan beberapa data dan informasi dari lapangan bahwa para peserta didik yang pernah mengikuti kegiatan tersebut pada umumnya;

1. Hampir tidak ada satu orang pun diantara mereka yang masih menekuni usaha yang dirintisnya setelah mengikuti program Kursus wirausaha perdesaan,

Abdul Karim Halim, 2015
**PENGEMBANGAN MODEL KURSUS WIRAUUSAHA PERDESAAN BERBASIS KEBUTUHAN PESERTA DIDIK
 UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN WIRAUUSAHAWAN BARU DI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
 KABUPATEN BOGOR**

2. Tidak mampu mengelola usaha bersama kelompok.
3. Tidak mampu mengembangkan usaha yang dimodali dengan dana bantuan pemerintah yang mereka dapatkan selepas mengikuti kursus, sebagai modal kelompok.
4. Tidak mampu melepaskan diri dari keterikatan kepada pengusaha inti tempat mereka dimagangkan oleh pengelola program, hal ini dikarenakan mereka tidak mampu mencari pasar baru dari barang yang diproduksi.
5. Tidak mampu mengembangkan ragam produk yang dihasilkan.

Agar pendidikan kecakapan hidup yang diberikan kepada mereka tepat sasaran dan berdaya guna, Ace Suryadi (2009 : 138) memberikan petunjuk sebagai berikut :

1. Target peserta didik adalah masyarakat perdesaan yang budaya hidupnya sederhana dan mempunyai ketergantungan pada kondisi alam.
2. Tingkat pendidikan penduduk rata-rata rendah, sehingga desain pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup yang diberikan harus sederhana dan disesuaikan dengan pemanfaatan potensi unggulan daerah yang ada seperti, pertanian, perkebunan, budi daya perikanan, peternakan, kehutanan dan kerajinan.
3. Tingkat kekerabatan masyarakatnya tinggi, sehingga partisipasi aktif tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemegang kekuasaan ekonomi desa (*local entrepreneur*) setempat harus *diintegrasikan*.
4. Jenis keterampilan yang akan diberikan kepada masyarakat sasaran sebagian besar diorientasikan untuk membangun kemandirian berusaha dalam memanfaatkan potensi desa khususnya dibidang pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kerajinan.

Sementara itu target yang dijadikan ukuran keberhasilan dari sebuah kegiatan Kursus Wirausaha Perdesaan yaitu harus menunjukkan adanya; 1. Perkembangan pada penguatan kelembagaan, yang meliputi administrasi dan teknis, 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik pada pengelola program atau pun masyarakat yang menjadi sasaran, 3. Terdapat program unggulan yang dihasilkan oleh proses kursus dan latihan, 4. Terdapat produk barang atau jasa yang dihasilkan secara berkesinambungan, 5. Pemanfaatan sarana/Prasarana (fasilitas) yang lebih mengutamakan sumber daya lokal, 6. Terjalin jaringan kemitraan dalam pengembangan dan pemasaran produk barang dan/atau jasa yang dihasilkan, 7. Terjadi proses pengendalian mutu dengan melakukan pemantauan, penilaian dan

pembinaan terhadap proses dan hasil produksi barang dan/atau jasa secara berkesinambungan, dan 8. Terjadinya pengembangan/perputaran anggaran dari hasil produksi barang dan/atau jasa, sehingga terjadi proses kemandirian dalam pengembangan dana/anggaran untuk kegiatan selanjutnya dengan tidak lagi hanya mengandalkan atau tergantung pada anggaran dan bantuan pemerintah. 9. Melahirkan para wirausahawan baru yang memiliki kreatifitas dan *inovasi* serta mewujudkannya dengan meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya, serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Kesembilan kriteria keberhasilan program tersebut di atas tidak nampak secara transparan dalam keseluruhan laporan, sehingga penulis menganggap perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap proses pelaksanaan program tersebut agar dapat diukur dan diketahui tingkat keberhasilannya, yaitu dapat melahirkan peserta didik yang mampu dan mandiri dalam berwirausaha setelah selesai mengikuti proses pembelajaran pada kursus wirausaha perdesaan.

Mengacu pada banyak faktor yang menjadi ukuran keberhasilan peserta didik dalam berwirausaha setelah mengikuti program Kursus wirausaha perdesaan, penulis bermaksud melakukan penelitian tentang kemampuan dan kemandirian wirausahawan baru yang sebelumnya telah mengikuti proses pembelajaran pada Kursus wirausaha perdesaan yang diselenggarakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bogor, sekaligus mencari *alternative* solusi dengan melakukan pengembangan model kursus wirausaha perdesaan berbasis kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan kemampuan wirausahawan baru. Hasil dari penelitian dan pengembangan model ini nantinya akan penulis rekomendasikan dengan harapan dapat dipergunakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar dalam melaksanakan program kursus wirausaha perdesaan, khususnya di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bogor.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah.

Sebagaimana dimaklumi bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di wilayah perdesaan, tetapi memiliki kesempatan dan fasilitas yang lebih sedikit untuk mendapatkan akses pembangunan. Hampir disemua sektor pembangunan, masyarakat desa selalu tertinggal. Dalam bidang pendidikan, masyarakat perdesaan jauh

Abdul Karim Halim, 2015

PENGEMBANGAN MODEL KURSUS WIRSAUSAHA PERDESAAN BERBASIS KEBUTUHAN PESERTA DIDIK UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN WIRSAUSAHAWAN BARU DI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN BOGOR

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tertinggal oleh masyarakat perkotaan, bila kondisi seperti ini dibiarkan bukan hanya akan melahirkan generasi muda yang buta ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan juga akan menghasilkan generasi muda yang tidak memiliki keterampilan/kecakapan hidup yang akan menjadi modal dalam mengelola berbagai sumber daya yang ada di sekitarnya.

Dengan modal pendidikan yang rendah seseorang akan banyak ketinggalan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan, bahkan akan mengalami banyak masalah walau pun hanya untuk sekedar berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara sekali pun, karena mereka tidak memiliki keberdayaan dalam bidang idologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Jangankan untuk menjadi pegawai pemerintah, untuk menjadi pegawai swasta pun banyak kesempatan yang tertutup. Peluang yang mungkin masih terbuka untuk mereka adalah menjadi buruh atau pegiat ekonomi sektor *informal*, namun demikian meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi turut menggeser kesempatan mereka untuk menjadi buruh atau pelaku usaha sektor *informal*. Untuk menjadi buruh tani, selain lahannya yang sudah makin menyusut, peran mereka sudah tergantikan oleh mekanisasi alat-alat pertanian. Untuk menjadi buruh mencuci pakaian sudah tergantikan oleh usaha *laundry*. Meningkatnya jumlah penduduk negeri ini, menyebabkan bertambahnya jumlah rumah terbangun dan menambah sempitnya lahan pekarangan mereka yang dapat dijadikan ladang usaha.

Namun demikian dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka seyogyanya kita dapat mencari usaha *alternative* yang dapat melahirkan pola kerja lebih efektif dan efisien sehingga kita dapat memanfaatkan sumber daya perdesaan yang tersedia yaitu dengan memberikan nilai tambah pada sumber daya alam tersebut sehingga dapat meningkatkan produktifitasnya baik secara kualitas maupun kuantitasnya serta memiliki nilai jual yang lebih baik dan barokah. Ada beberapa contoh teknologi tepat guna yang dapat dipergunakan oleh masyarakat perdesaan dalam memanfaatkan lahan sempit, padat karya dan dapat meningkatkan pendapatan keluarga, antara lain; usaha budi daya ternak lele jumbo dalam kolom plastik, beternak cacing *lumricus*,

Abdul Karim Halim, 2015

PENGEMBANGAN MODEL KURSUS WIRAUUSAHA PERDESAAN BERBASIS KEBUTUHAN PESERTA DIDIK UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN WIRUSAHAWAN BARU DI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN BOGOR

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

beternak jangkrit, bertani jamur tiram, membuat makanan jajanan berbasis bahan baku hasil pertanian, membuat berbagai kerajinan tangan (*handycraf*). bertani *hidroponyk*, budi daya tanaman hias, dan lain-lain.

Para pengelola program yang merupakan sumber belajar pada setiap Sanggar Kegiatan Belajar sebenarnya sudah mengikuti ketentuan tersebut di atas, namun demikian dalam prakteknya mereka menemukan kesulitan untuk menghasilkan seorang wirausahawan baru yang lebih mampu dan mandiri dalam berwirausaha, para lulusan program ini pada umumnya belum dapat memanfaatkan hasil belajarnya secara optimal. Hal ini terjadi karena para pelaksana program kursus wirausaha perdesaan lebih mengutamakan kecakapan *vocasional*, belum memperhatikan pengembangan kecakapan lainnya, yaitu kecakapan kepribadian, kecakapan sosial dan kecakapan akademik, yang harus dimiliki oleh peserta didik secara terpadu, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk memasarkan produk barang dan/atau jasa yang dihasilkan serta berani dan mampu untuk hidup mandiri.

Masalah lainnya adalah model pembelajaran yang mereka pergunakan belum sinkron dengan strategi pembelajaran kewirausahaan, tetapi masih fokus pada pendidikan keterampilan produktif yaitu pendidikan keterampilan untuk menghasilkan barang dagangan, belum sampai pada pendidikan kecakapan hidup yang dapat mengembangkan produk barang/jasa, *marketing*, *diversifikasi* usaha, penggalan sumber modal, pengembangan jaringan kemitraan dan manajerial. Model pembelajaran yang saat ini dilakukan hanya mampu menghasilkan masyarakat pekerja (*worker society*) bukan wirausahawan (*entrepreneur*). Seharusnya para pamong belajar menggunakan dan mengembangkan metode pembelajaran yang mampu memunculkan pergeseran orientasi dari hanya sekedar menjadi *produsen* (penghasil) barang dan/atau jasa kepada *saller* (penjual/pedagang) barang dan/atau jasa atau lebih jauh dari itu, yaitu menghasilkan wirausahawan, pencipta lapangan pekerjaan (*employee society*).

Model pembelajaran yang dipergunakan dalam pengelolaan kursus wirausaha perdesaan seharusnya mampu menghasilkan wirausahawan yang mandiri dan memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya sosial

Abdul Karim Halim, 2015

PENGEMBANGAN MODEL KURSUS WIRAUSAHA PERDESAAN BERBASIS KEBUTUHAN PESERTA DIDIK UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN WIRAUSAHAWAN BARU DI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN BOGOR

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dan sumber daya manusia potensial perdesaan yang belum terolah menjadi lebih menarik, sehingga mereka menjadi lebih tertarik untuk mengembangkan berbagai sumber daya yang dimilikinya sebagai sumber pekerjaan berbasis sumber daya lingkungan dan pada akhirnya mereka tidak melakukan *migrasi* atau *urbanisasi*.

Kondisi sumber daya alam, sumber daya sosial dan sumber daya manusia di perdesaan memiliki keragaman dan berpengaruh terhadap keragaman kebutuhan hidup manusianya yang pada akhirnya akan berpengaruh pula terhadap kebutuhan belajar manusianya. Strategi, metode, dan teknik pembelajaran, kemampuan menggali kebutuhan belajar, pendampingan yang tidak optimal dan banyak hal yang menjadikan pelaksanaan proses pembelajaran pada kursus wirausaha perdesaan tidak efektif dan tidak efisien. Para pengelola program dan pamong belajar yang bekerja lebih berorientasi pada pemenuhan target lembaga, tetapi kurang memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik, maka dapat dipastikan pelaksanaan kursus wirausaha perdesaan tersebut hasilnya akan lebih memperhatikan tertib administrasi dan hanya akan menghasilkan calon tenaga kerja yang siap dipekerjakan di perusahaan milik pemerintah atau swasta dan pada umumnya berada di perkotaan.

Berdasarkan pada pokok permasalahan tersebut di atas, maka masalah dalam penelitian ini, penulis rumuskan menjadi; “Bagaimana Model Kursus Wirausaha Perdesaan Berbasis Kebutuhan Peserta Didik untuk Meningkatkan Kemampuan Wirausahawan Baru di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bogor?”. Perumusan masalah tersebut di atas penulis rinci menjadi beberapa batasan masalah yang dikemukakan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut;

1. Bagaimana kondisi faktual program kursus wirausaha perdesaan di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana kondisi faktual kemampuan wirausahawan peserta didik kursus wirausaha perdesaan di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bogor?
3. Bagaimana model konseptual kursus wirausaha perdesaan berbasis kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan kemampuan wirausahawan baru di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bogor?

4. Bagaimana pelaksanaan pengembangan model kursus wirausaha perdesaan berbasis kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan kemampuan wirausahawan baru di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bogor?
5. Bagaimana efektifitas pelaksanaan pengembangan model kursus wirausaha perdesaan berbasis kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan kemampuan wirausahawan baru di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bogor .

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model program kursus wirausaha perdesaan berbasis kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan kemampuan wirausahawan baru di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bogor.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari pada penelitian ini adalah untuk;

- a. Mendeskripsikan kondisi faktual program kursus wirausaha perdesaan di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bogor.
- b. Mendeskripsikan kondisi faktual kemampuan wirausahawan peserta didik kursus wirausaha perdesaan di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bogor?
- c. Mengembangkan konsep model kursus wirausaha perdesaan berbasis kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan kemampuan wirausahawan baru di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bogor?
- d. Memperoleh gambaran pelaksanaan pengembangan model kursus wirausaha perdesaan berbasis kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan kemampuan wirausahawan baru di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bogor.
- e. Mengkaji efektifitas pelaksanaan pengembangan model kursus wirausaha perdesaan berbasis kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan kemampuan wirausahawan baru di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bogor.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk kepentingan pengembangan konsep teoritis maupun kepentingan-kepentingan praktis. Dari sudut

Abdul Karim Halim, 2015

PENGEMBANGAN MODEL KURSUS WIRSAUSAHA PERDESAAN BERBASIS KEBUTUHAN PESERTA DIDIK UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN WIRSAUSAHAWAN BARU DI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN BOGOR

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pandang teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan bahan kajian *empiric* yang memungkinkan dikembangkan lebih lanjut menjadi teori guna menambah khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pendidikan, khususnya dalam pendidikan luar sekolah (*nonformal/informal*).

2. Manfaat Praktis.

Secara praktis, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran, masukan dan *alternative* yang tepat bagi satuan-satuan pendidikan luar sekolah baik yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat seperti Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan *Nonformal/Informal* (P2-PAUDNI), Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan *Nonformal/Informal* (BP2-PAUDNI), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Satuan Pendidikan *Nonformal/Informal* lainnya untuk meningkatkan kualitas program kursus wirausaha perdesaan yang berorientasi pada menghasilkan peserta didik yang memiliki kecakapan akademik, kecakapan sosial, kecakapan *personal* dan kecakapan *vocasional* untuk meningkatkan kemandirian wirausahawan baru sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Peserta didik yang memiliki keempat kecakapan hidup tersebut akan mampu mandiri dalam lingkungan sosialnya termasuk didalamnya memiliki kemampuan berwirausaha (*entrepreneurship*).

E. Sistematika Penulisan

Penulisan Disertasi ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut;

Bab I : Pendahuluan, terdiri dari; A. Latar Belakang Masalah. B. Identifikasi dan Perumusan Masalah. C. Tujuan Penelitian. D. Manfaat Penelitian dan E. Sistematika Penulisan.

Bab II : Landasan Teoritik, terdiri dari; A. Hakekat Kemandirian. B. Hakekat Kewirausahaan. C. Strategi Pembelajaran Berbasis Kebutuhan. D. Penelitian Terdahulu yang Relevan dan E. Kerangka Pemikiran.

Bab III : Metode Penelitian, terdiri dari; A. Lokasi dan Subyek Penelitian. B. Desain Penelitian. C. Pendekatan dan Metode Penelitian. D. Instrumen Penelitian. E. Teknik Pengumpulan Data. F. Analisis Data Hasil Penelitian.

Abdul Karim Halim, 2015

PENGEMBANGAN MODEL KURSUS WIRSAUSAHA PERDESAAN BERBASIS KEBUTUHAN PESERTA DIDIK UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN WIRSAUSAHAWAN BARU DI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN BOGOR

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari; A. Kondisi Faktual Program Kursus Wirausaha Perdesaan. B. Kondisi Faktual Kemampuan Wirausahawan Peserta Didik Kursus Wirausaha Perdesaan. B. Perencanaan Pengembangan Model Kursus Wirausaha Perdesaan Berbasis Kebutuhan. C. Uji Coba Model Kursus Wirausaha Perdesaan Berbasis Kebutuhan D. Uji Efektifitas Model Kursus Wirausaha Perdesaan Berbasis Kebutuhan, E. Pembahasan

Bab V : Simpulan dan Rekomendasi, terdiri dari; A. Simpulan dan B. Rekomendasi.